



Kasus Bansos Siap Disidang

PONTIANAK-RK. Mantan Sekda
Kejaksanaan Tinggi Kota Pontianak
(Kejati) Kalbar menyatakan kasus bantuan sosial (Bansos) fiktif Masih Diperiksa
Pemkot Pontianak tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 yang melibatkan mantan Walikota Pontianak, Buchary A Rachman dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pontianak, Hasan Rusbini siap disidangkan di Pengadilan Tipikor Negeri Pontianak. "Berkasnya hampir rampung untuk disidangkan," kata Didik Istiyanta, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalbar, Senin (24/11).

Buchary sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan dan mengembalikan uang Rp1 miliar. Namun, tersangka Hasan Rusbini hingga kini belum siap dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan alasan sakit. Hingga saat ini, lanjut Didik, penyidik Kejati Kalbar masih melakukan pemeriksaan terhadap Hasan Rusbini.

Buchary sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan dan mengembalikan uang Rp1 miliar. Namun, tersangka Hasan Rusbini hingga kini belum siap dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan alasan sakit. Hingga saat ini, lanjut Didik, penyidik Kejati Kalbar masih melakukan pemeriksaan terhadap Hasan Rusbini.

■ Halaman 15

Kasus Bansos.....dari halaman 9

"Tersangka Hasan Rusbini selalu sakit apabila kami panggil untuk diperiksa," katanya.

Kasus yang merugikan negara miliaran rupiah ini, Kejati Kalbar baru menetapkan dua tersangka. "Nilai kerugian Negara untuk sementara Rp10 miliar. Tersangka bisa saja bertambah," papar Didik.

Didik memaparkan, dalam kasus ini sudah melayangkan surat panggilan pemeriksaan sekitar 400-500 lembar. Mereka yang dipanggil para penerima dana bantuan sosial saat itu. Para penerima bantuan tersebut dipanggil berdasarkan data dari proposal yang masuk ke Pemkot Pontianak.

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Desember 2009

menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp21,46 miliar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bansos tahun anggaran 2006, 2007, dan 2008 di Pemkot Pontianak. Indikasi ditemukan pada pengelolaan dana Bansos Kota Pontianak sebesar Rp16 miliar tidak sesuai peruntukan, di antaranya menimbulkan indikasi kerugian daerah Rp12,5 miliar. Realisasi dana Bansos tahun 2007 sebesar Rp1,7 miliar dan dana APBD lainnya sebesar Rp3,2 miliar digunakan untuk menutup pengeluaran kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Indikasi kerugian daerah juga ditemukan pada pemberian dana Bansos tahun 2006 sampai dengan 2008 sebe-

sar Rp2,2 miliar, tidak sampai kepada penerima bantuan. Realisasi belanja Bansos sebesar Rp935 juta didasarkan pada proposal permohonan dana bantuan fiktif dan Pajak Penghasilan (PPH) atas kontrak pemain Persipon minimal sebesar Rp939,75 juta tidak dipungut dan disetor ke kas negara.

BPK RI juga menemukan permasalahan pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos Rp3 miliar untuk pembangunan sirkuit balap motor pada Pengurus Cabang Ikatan Motor Indonesia Kota Pontianak tidak jelas, penatausahaan dana bantuan sosial KONI Kota Pontianak kurang memadai, dan dana sebesar Rp8,4 miliar belum dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan. (oxa)